



PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

**PERJANJIAN
KINERJA**

TAHUN 2022

Jl. Mgr. Soegijopranoto No. 105,
Telp. 0298-595259, Fax. 0298- 593844 AMBARAWA
Website : <http://www.pa-ambarawa.go.id>,
e-mail : pa_ambarawa20@yahoo.co.id

@2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ISHAK LUBIS, S.Ag**
NIP : 19690622.199703.1.001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Klas 1-B Ambarawa
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.**
NIP. : 19640307.199203.1.004
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.
NIP. 19640307.199203.1.004

Ambarawa, 03 Januari 2022
Pihak pertama

ISHAK LUBIS, S.Ag
NIP. 19690622.199703.1.001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SATKER : PENGADILAN AGAMA AMBARAWA
TAHUN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97.68 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99.67 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100 %
		f. Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	11.36 %
		c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	- %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		c. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	67 %
Perjanjian Kinerja Tambahan			
5.	Terwujudnya Pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Terlaksananya kerjasama antar instansi / lembaga	100%
6.	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran;	Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	95%

7.	Terlaksananya Pemenuhan dan Penatausahaan asset dan BMN secara transparan dan akuntabel;	a. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	100%
		b. Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	100%
8.	Terwujudnya Rencana Program dan Anggaran yang efektif dan efisien;	Terlaksananya Program dan Anggaran secara transparan, efektifitas, dan efisien	100%
9.	Terwujudnya Pengelolaan Kepegawaian yang berorientasi hasil, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan	a. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM	100%
		b. Terwujudnya hasil pembinaan bagi aparatur di lingkungan peradilan	100%
		c. Terwujudnya database pegawai yang valid	100%
10.	Terwujudnya Penatausahaan Tata Naskah dinas sesuai dengan ketentuan	Terlaksananya Penatausahaan Tata Naskah dinas sesuai dengan Perka Anri No. 5 tahun 2021	100%
11.	Terwujudnya Pengelolaan Ortala dan Tugas pendukung lainnya	a. Terlaksananya pengelolaan tata laksana organisasi	100%
		b. Terwujudnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	100%
		c. Terlaksananya pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	100%
		d. Terwujudnya kualitas pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	100%

NO	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminsitasi	4.142.609.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	127.500.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	90.180.000,-

Pihak Kedua

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.
NIP. 19640307.199203.1.004

